BP JAMSOSTEK FASILITASI VAKSINASI BAGI PEKERJA

Penyuntikan Dosis Kedua Mulai Digencarkan

YOGYA (KR) - Selain fokus menyasar berbagai elemen masyarakat untuk mendapatkan vaksin Covid-19, Pemda DIY juga tengah menggencarkan suntikan dosis kedua. Terutama bagi warga yang telah mendapatkan suntikan dosis pertama periode satu hingga tiga bulan lalu sesuai jenis vaksin.

Ketua Percepatan Vaksinasi DIY Sumadi, menjelaskan capaian vaksinasi saat ini sudah tergolong tinggi yakni mencapai 81,23 persen. Sedangkan untuk dosis kedua 45,9 persen. "Kita pacu (dosis kedua) karena memang mengikuti (dosis pertama)," jelasnya di sela meninjau vaksinasi yang difasilitasi BP Jamsostek, Kamis (30/9).

Diakuinya, vaksinasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata melainkan seluruh pihak. Sumadi pun menyambut baik kontribusi yang diberikan oleh BP Jamsostek dengan memfasilitasi vaksinasi bagi kalangan pekerja. Dirinya berharap pada akhir November seluruh warga yang ada di DIY sudah menjalani vaksinasi hingga 100 persen.

"Banyak hal yang sudah dan sedang kami lakukan. Salah satunya vaksinasi bagi lansia dengan sistem jemput bola. Armada vaksinasi juga kami kerahkan bekerja sama dengan TNI dan Polri. Sesuai arahan Bapak Gubernur, akhir November harus bisa mencapai 100 persen," urai Sumadi.

Sementara Deputi Direktur BP Jamsostek Wilayah DIY Jawa Tengah Sumilwan Rachmat, menjelaskan vaksinasi dosis kedua kali ini menyasar 1.300 pekerja yang berada di sektor telekomunikasi. Para pekerja sektor lain juga sudah dijadwalkan memperoleh vaksinasi dosis kedua. Sasaran vaksinasi bagi pekerja tersebut tidak terbatas yang sudah menjadi peserta BP Jamsostek melainkan juga yang belum menjadi peserta. "Tapi kami imbau untuk segera mendaftar menjadi peserta BP Jamsostek karena manfaatnya luar biasa dalam melindungi pekerja," imbaunya.

Secara nasional, imbuh Sumilwan, pihaknya sudah memfasilitasi 92.700 pekerja untuk memperoleh vaksinasi. Vaksinasi massal kali ini pun merupakan gelaran yang kedua puluh. Selanjutnya akan menyasar daerah lain seperti di Solo dan Semarang. Setiap pelaksanaan vaksinasi massal yang digelar oleh BP Jamsostek, pihaknya turut menggandeng pemerintah daerah setempat agar target sasarannya terkoordinasi. **(Dhi)-f**

KR-Ardhi Wahdan

Vaksinasi massal dosis kedua bagi kalangan pekerja DIY yang difasilitasi BP Jamsostek.

MILAD KE-103

Mukarta Komitmen Cetak Generasi Berkarakter

KR-Ivan Aditya

Para guru dan panitia Milad ke-103 SD Mukarta berfoto bersama Dirut PT BP Kedaulatan Rakyat M Wirmon Samawi SE MIB.

YOGYA (KR) - Memasuki usianya ke-103, SD Muhammadiyah Karangkajen Yogyakarta (Mukarta) terus berinovasi guna memberi pelayanan terbaik bagi siswa. Sebagai sekolah yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada 18 November 1918, SD Muhammadiyah Karangkajen Yogyakarta meneguhkan komitmennya mencetak generasi bangsa untuk menjadi pemimpin di kemudian hari.

"Usia ke-103 ini bisa menjadi tonggak bersejarah bagi SD Mukarta dan amal usaha Muhammadiyah. Bangsa ini ke depan perlu generasi penerus yang bisa memimpin Indonesia untuk dapat lebih maju dan itu menjadi tugas dan cita-cita kami," kata Kepala SD Muhammadiyah Karangkajen Yogyakarta, Tri Nugroho SPd saat silaturahmi di Kantor PT BP *Kedaulatan Rakyat* yang diterima Direktur Utama M Wirmon Samawi SE MIB, Direktur Keuangan Imam Satriadi SH dan Direktur Produksi Baskoro Jati Prabowo SSos, Kamis (30/9).

Tri Nugroho menyampaikan, dalam milad ke-103 ini SD Muhammadiyah Karangkajen terus menguatkan kerjasama dengan berbagai pihak guna meningkatkan mutu pendidikan. Pembentukan karekter, keberanian dan kejujuran harus diutamakan sehingga pemimpin-pemimpin bangsa dapat lahir dari sekolah-sekolah Muhammadiyah.

Mengusung tema ëDengan Seni Mukarta Berkreasií, berbagai kegiatan bakal dilaksanakan dalam memeriahkan Milad ke-103 SD Muhammadiyah Karangkajen Yogyakarta. Kegiatan nantinya akan dibagi dalam dua konsep yakni internal dan eksternal.

Ketua Panitia Milad ke-103 SD Mukarta, Sadam Priyanto SPd mengatakan rangkaian kegiatan akan dimulai pada bulan ini di antaranya dengan menggelar bakti sosial, lomba hafalan surat Alquran maupun adzan bagi para siswa. Selain itu ada pula kegiatan mewarnai, menggambar dan yang terbaru yakni lomba TikTok Islami bagi para murid TK se-DIY. "Puncak milad ke-103 pada 13 November dengan pengajian dan khataman Alquran baik secara offline maupun online," jelasnya. **(Van)-f**

PERMUDAH URUS LEGALITAS USAHA

Akses NIB Pelaku UMKM Dipercepat

YOGYA (KR) - Pemerintah akan mempermudah pelaku UMKM untuk mengurus legalitas usaha. Salah satunya berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) yang akan dipercepat karena kepemilikan legalitas tersebut baru sekitar 50 persen.

Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogya Tri Karyadi Riyanto, menjelaskan total ada sekitar 22.000 pelaku UMKM. Akan tetapi baru separuhnya yang sudah memiliki NIB. "Jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang memiliki NIB harus terus bertambah. Upaya percepatan dibantu oleh Garda Transfumi dari Kementerian Koperasi dan UKM," jelasnya, Kamis (30/9).

Menurutnya, satu kesulitan yang dihadapi untuk mendorong seluruh pelaku usaha mengurus legalitas berupa NIB adalah ketidaktahuan pelaku usaha terkait pentingnya kepemilikan legalitas tersebut. Sehingga masih dibutuhkan edukasi mengenai fungsi NIB. "Banyak yang belum paham sehingga tidak mengurus NIB. Padahal, syaratnya sangat mudah dan pengajuan pun dilakukan secara online," imbuhnya.

Dengan NIB, pelaku usaha bisa mengakses atau mendapat fasilitas bantuan dari pemerintah. Salah satunya bantuan produktif UMKM yang digulirkan tahun ini.

Sementara itu, salah satu mentor Garda Transfumi Kemenkop UKM yang bertugas di Yogyakarta Muhervi Emasna, mengatakan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk memiliki NIB sudah dilakukan sejak Juni. Setiap mentor memiliki target jumlah UMKM yang didampingi untuk mendapat NIB. Hingga saat ini dirinya dapat mendampingi sekitar 170 UMKM untuk mendapat NIB dari target 200 pelaku usaha. "Sekitar 70 persennya adalah pelaku kuliner, dan sisanya adalah pelaku usaha di bidang fesyen, kriya, dan jasa seperti bengkel," katanya.

Diakuinya, pelaku usaha kurang memiliki kesadaran untuk mengurus NIB karena belum mengetahui fungsi nomor legalitas usaha tersebut. Selain itu, meski syarat untuk mengajukan NIB sangat mudah yaitu memiliki KTP dan usaha, namun banyak pelaku UMKM yang kesulitan mengisi data teknis usaha seperti kapasitas produksi dan kapasitas penjualan. Oleh karena itu pihaknya harus mendampingi untuk mengisi data-data teknis tersebut. **(Dhi)-f**

Perluasan Destinasi Wisata Perlu Dipertimbangkan

YOGYA (KR) - Usulan Pemda DIY untuk memperluas destinasi wisata perlu dipertimbangkan oleh pemerintah pusat. "Sebaiknya pemerintah mulai mempertimbangkan usulan perluasan pembukaan destinasi wisata. Jadi sudah saatnya pemerintah mulai mengkaji kebijakan yang tepat dan terukur. Semua itu perlu dilakukan untuk memfasilitasi wisatawan khususnya wisatawan lokal dengan tetap menerapkan prokes secara ketat," kata pengamat pariwisata dari Akademi Stipary Yogyakarta, Suharto MPar di Yogyakarta, Kamis (30/9).

Diungkapkan, usulan untuk melakukan perluasan destinasi wisata itu muncul, karena meski banyak destinasi wisata yang masih ditutup tapi wisatawan justru mencari celah untuk masuk ke beberapa objek wisata.

Kondisi tersebut kalau tidak dicarikan solusi yang tepat dan hati hati justru akan berisiko terhadap lonjakan kasus baru Covid-19. Karena pemerintah tidak bisa memantau secara langsung kondisi yang ada di lapangan. "Saya kira pembukaan destinasi wisata bisa dilakukan secara bertahap dengan pembatasan kapasitas. Adapun untuk pelaksanaannya pemerintah harus bekerjasama dengan seluruh stakeholders utamanya pengelola objek wisata dan pelaku pariwisata. Hal itu untuk memastikan setiap destinasi wisata harus memiliki SOP yang tepat bagi semua pengunjung," terangnya. **(Ria)-f**

MESKI BANYAK YANG MENGUSIK

Pertahankan Tap MPRS XXV Tahun 1966

YOGYA (KR) - Peristiwa kelam pengkhianatan G 30 S PKI tahun 1965 yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi Komunis, tidak boleh dilupakan oleh bangsa Indonesia. Sebab, upaya untuk mengganti ideologi Pancasila terus dilakukan oleh mereka yang berpaham ideologi komunis, dengan berbagai cara.

Oleh karena itu, Panglima Gerakan Anti Komunis (Gepako) Drs HM Gandung Pardiman MM menyerukan agar Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966, tetap dipertahankan. Tap MPRS tersebut berisi tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkian faham atau ajaran komunis/marxisme-leninisme.

KR-Istimewa

Drs HM Gandung Pardiman MM

"Kita harus mempertahankan keberadaan Tap MPRS nomor 25 tahun 1966 tersebut dan jangan sampai dihapuskan. Kalau tidak ada Pak Harto, Indonesia sudah menjadi negara komunis. Oleh karena itu, kita patut hormat dan bangga pada beliau atas jasa-jasanya membebaskan NKRI dari komunis," tegas Gandung Pardiman dalam keterangan pers yang diterima *KR*, Kamis (30/9).

Sebagai kader Golkar dan pancasilais sejati yang ingin mempertahankan ideologi Pancasila dan NKRI, maka Gandung Pardiman mendirikan Gerakan Pasukan anti Komunis (Gepako). Gepako merekrut generasi muda yang cinta Pancasila dan NKRI. "Gepako berdiri karena adanya upaya dari pihak-pihak berideologi Komunis yang ingin mengganti Pancasila dengan Komunis. Gepako hingga saat ini konsisten menjaga Pancasila dan akan terus menghadapi bahaya laten komunis," ujarnya.

Gandung Pardiman yang juga anggota DPR RI menambahkan, Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober bisa dijadikan momentum pengingat agar ormas-ormas antikomunis untuk merapatkan barisan, bersatu menghadapi bahaya laten Komunis. Sebab disinyalir masih ada orang-orang yang memiliki paham ideologi komunis dan saat ini berada di dalam birokrasi pemerintahan melakukan berbagai cara untuk mengaburkan peristiwa pengkhianatan G 30 S PKI. **(Dev)-f**

Digugat, PMI DIY Diminta Tunda Musda

YOGYA (KR) - Masih belum diterbitkan SK Kepengurusan PMI Kota Yogya oleh Ketua PMI DIY, Pengurus PMI Kota Yogya yang belum dilantik (Penggugat) telah melayangkan Gugatan Perdata pada Ketua PMI DIY di PN Sleman. Dengan gugatan tersebut maka Musda PMI DIY yang akan digelar 2 Oktober 2021 diharapkan bisa ditunda sampai ada putusan hukum tetap.

Kuasa Hukum Penggugat Suswoto SH MH dan Sri Hendaryo Kunto SH menyebutkan, Musda dinilai bakal menimbulkan kontroversi karena kontingen PMI Kota Yogyakarta bakalan tidak punya hak suara sebelum kepengurusan disahkan. "Bila dipaksakan Musda ini pertama kalinya PMI Kota Yogya tidak bisa memberikan hak suara," tegas kuasa hukum Penggugat Suswoto SH dan Sri Hendaryo Kunto SH MH dalam jumpa pers, Senin (27/9).

Didampingi perwakilan penggugat, Pengurus PMI Kota lainnya yang belum dilantik Edi Buwono Eko Nugroho, Munif Tauchid, FX Supardi, Suswoto menyebutkan Muskot 30 Maret 2021 dihadiri Sekretaris PMI DIY, Arief Noor Hartanto (Inung) dan sesuaI AD ART PMI. "Jika perwakilan tidak mempersoalkan hasil Muskot pada waktu itu, maka semua produk Muskot sah," jelasnya.

Termasuk susunan kepengurusan yang dibentuk oleh ketua terpilih dan formatur juga wajib disahkan, hal tersebut juga diatur dalam AD/ART PMI. "Jika Musda dipaksakan berpotensi cacat hukum, jika nantinya hasil gugatan di pengadilan menyatakan yang bersangkutan (Ketua PMI DIY) melanggar hukum," jelasnya.

Sementara Ketua PMI DIY, GBPH Prabukusumo ketika dikonfirmasi tidak mau memberikan keterangan atau komentar apapun. **(Vin)-f**

Jadwal Layanan Vaksinasi
Kota Yogyakarta
Hari Sabtu, 2 Oktober 2021

Lokasi	Sasaran	Waktu	CP
XT Square	12 th ke atas	08.00-12.00 WIB	08112947788

Keterangan:
- Contak Person telp jam kerja, WA 24 jam dibalas jam kerja.
- Dosis 2 pelajar.

(DHI/JOS)

Homeschooling HSPG Rujukan Nasional Muatan Khusus

YOGYA (KR) - Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Puskurbuk Kemdikbud Ristek) RI melakukan uji coba capaian pembelajaran muatan khusus, terutama rekayasa teknologi di Homeschooling HSPG Yogyakarta. Dalam kegiatan ini, Puskurbuk meminta masukan Homeschooling HSPG untuk penyempurnaan desain kurikulum muatan khusus, yang nantinya akan dijadikan kurikulum nasional.

General Manager Homeschooling HSPG, Anggo Marantika MSc mengatakan, Homeschooling HSPG menjadi rujukan Puskurbuk Kemdikbud Ristek, karena dinilai yang paling mampu menyelenggarakan muatan khusus rekayasa teknologi ini.

"Dari ribuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKMB) yang ada di Indonesia, Homeschooling HSPG adalah satu-satunya lembaga yang dipilih oleh Puskurbuk sebagai acuan penyusunan kurikulum muatan khusus, khususnya untuk keterampilan rekayasa teknologi," terang Anggo kepada *KR*, Rabu (29/9). Adapun kegiatan uji coba capaian pembelajaran muatan khusus diselenggarakan, 24-25 September 2021.

Dijelaskan Anggo, Homeschooling HSPG sendiri telah memiliki kurikulum muatan khusus rekayasa teknologi dan telah berjalan dengan baik. Menurut Anggo, masukan-masukan dari Homeschooling HSPG ini nantinya akan menjadi input bagi Puskurbuk dalam penyempurnaan desain kurikulum muatan khusus.

Direktur Homeschooling HSPG, Ir Kusnanto MM mengatakan, keterlibatan dalam pilot project Puskurbuk menjadi kebanggaan tersendiri bagi Homeschooling HSPG. **(Dev)-f**

KR-Devid Permana

Uji coba pembelajaran muatan khusus di Homeschooling HSPG.